

**PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

Mila Aguspita
NIM. 52151005

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Mila Aguspita
NIM. 52151005

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mila Aguspita

NIM : 52151005

Tempat/Tanggal Lahir : Stabat/02Agustus 1997

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jalan Pancing Gang Murni No. 24 Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Medan”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 07 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

Mila Aguspita
NIM. 52151005

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Medan

Oleh:

Mila Aguspita
NIM. 52151005

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 17 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marliyah M.Ag
NIP. 196706072000031003

Rahmat Daim Harahap, M.Ag
NIP.199009262018031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 19730510199803 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN**” an. Mila Aguspita, NIM 52151005 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 05 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 05 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIP. 198006142015032001

Anggota

Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIP. 199009262018031001

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP. 197601262003122003

Dr. Nurlaila, SE, MA.
NIP. 196706072000031003

Imsar, M.Si
NIP. 198703032015031004

Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Mila Aguspita. NIM. 52151005. Skripsi berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan,”** Pembimbing I Ibu Dr. Marliyah, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang dari data kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di 53 OPD Kota Medan. Metode pengumpulan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dengan kriteria OPD yang berbentuk Inspektorat, Badan dan Dinas sehingga jumlah sampel yang didapat sebanyak 64 orang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y_1). Kedua, variabel pengawasan keuangan daerah (X_2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y_1). Ketiga, variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) dan pengawasan keuangan daerah (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y_1). Keempat, variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) dan pengawasan keuangan daerah (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2). Kelima, variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah (X_1) dan pengawasan keuangan daerah (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2).

Kata Kunci: Akuntabilitas, pengawasan keuangan daerah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Medan”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan segenap upaya, yang semuanya hanya dapat terlewati atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sebagai hamba-Nya, penulis memiliki keterbatasan namun berusaha melakukan upaya yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Stata Satu (S1) jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terima kasih teruntuk berbagai pihak yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan segala yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak **Hendra Harmain, M.Pd** selaku ketua jurusan sekaligus penasehat akademik yang telah sabar membimbing penulis dalam penulisan proposal skripsi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan program perkuliahan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Ibu **Dr. Marliyah, M.Ag** selaku pembimbing I dan Bapak **Rahmat Daim Harahap, SE, M.Ak** selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan sumbangan pemikiran dan waktu hingga skripsi ini bisa selesai.
4. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Bapak **Drs. Farit Wajedi, M.S** beserta seluruh pegawai bagian keuangan di seluruh OPD kota Medan yang telah bersedia mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Orang tua tercinta Ayahanda **Alimuddin** dan Ibunda **Rukiyah** yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Teristimewa untuk Kakak tersayang **Evi Handayani** dan **Laila Nazha** serta Abang tercinta **Faisal Abdillaah, Muhammad Syafrizal** dan **Aulia Rahman** yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, dan doa.
8. Teruntuk Sahabat Seperjuangan **Silvia Nasution S.Pd, Kesuma Pratiwi Ningsih, Saidati Aisyah** yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman stambuk 2015 kelas Akuntansi Syariah B, terkhusus sahabat-sahabat tersayang **Anju Agustin Damanik S.Akun, Lili Aulia S. Akun, Rizki Arvi Yunita S.Akun, Nur Faznita Elmi S.Akun, Nur'aini S.Akun** dan Sahabat **Trio Pemu** dan teman seperjuangan MAN 1 Stabat, **Siti Nurjannah dan Nurul Mahfuzhah** dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.

10. Dan semua pihak yang turut mendo'akan, memberikan semangat, motivasi dan telah berkenan membantu penulis.

Tidak adanya nama bukan bermaksud mengurangi rasa terima kasih penulis, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas dengan kebaikan, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekhilafan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah wabarakaatuh

Medan,10 Oktober 2019

Penulis

Mila Aguspita
NIM. 52.15.1.005

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori	11
1. Transparansi	11
a. Pengertian Transparansi	11
b. Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12

c. Indikator Transparansi	13
d. Transparansi dalam Perspektif Islam.....	15
2. Akuntabilitas	17
a. Pengertian Akuntabilitas	17
b. Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	18
c. Indikator Akuntabilitas	17
d. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam	20
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.....	22
a. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.....	22
b. Indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	25
4. Pengawasan	25
a. Pengertian Pengawasan	25
b. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah	26
c. Jenis Pengawasan	27
d. Indikator Pengawasan	29
e. Pengawasan dalam Perspektif Islam	30
5. Hubungan Antar Variabel	32
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pemikiran	40
D. Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan data.....	47
F. Defenisi Operasional	48
G. Teknik Analisa Data	54

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan.....	60
B. Deskripsi Data Penelitian.....	61
C. Analisis Statistik Deskriptif.....	63
D. Uji Kualitas Data	64
1. Uji Validitas	65
2. Uji Reliabilitas	66
E. Uji Asumsi Klasik	67
1. Uji Asumsi Klasik Regresi Pertama	67
a. Uji Normalitas	67
b. Uji Multikolinearitas	68
c. Uji Heteroskedastisitas	69
2. Uji Asumsi Klasik Regresi Kedua.....	70
a. Uji Normalitas	70
b. Uji Multikolinearitas	71
c. Uji Heteroskedastisitas	72
F. Analisis Regresi	73
1. Analisis Regresi Pertama.....	73
2. Analisis Regresi Kedua	75
G. Uji Hipotesis.....	76
1. Uji Hipotesis Regresi Pertama	76
a. Uji Koefisien Determinasi.....	76
b. Uji t.....	72
c. Uji F.....	78
2. Uji Hipotesis Regresi Kedua.....	79
a. Uji Koefisien Determinasi	79
b. Uji t	79
c. Uji F	80

H. Pembahasan.....	81
--------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	34
3.1 Waktu Penelitian	44
3.2 Sampel Penelitian	45
3.3 Defenisi Operasional Variabel Independen.....	51
3.4 Defenisi Operasional Variabel Dependen.....	52
4.1 Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner	62
4.2 Deskripsi Data Respoden	62
4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	64
4.4 Hasil Uji Validitas	65
4.5 Hasil Uji Reliabilitas	66
4.6 Hasil Uji Normalitas (<i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>).....	68
4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	69
4.8 Hasil Uji Normalitas (<i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test ke 2</i>)	71
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	72
4.10 Analisis Regresi Linear Berganda Pertama.....	73
4.11 Analisis Regresi Linear Berganda Kedua	74
4.12 Hasil Uji Determinasi	76
4.13 Hasil Uji Analisis Parsial (uji t).....	77
4.14 Hasil Uji F	78
4.15 Hasil Uji Determinasi 2.....	79
4.16 Hasil Uji Analisis Parsial (uji t).....	80
4.17 Hasil Uji F	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
4.1 <i>Scatter Plot</i> Uji Heterokedastisitas 1	70
4.2 <i>Scatter Plot</i> Uji Heterokedastisitas 2	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Hasil Uji SPSS
2. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik masih termasuk baru dalam bidang akuntansi di Indonesia, namun dalam waktu yang singkat telah mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat agar anggaran dikelola secara akuntabel dan transparan.¹

Akuntabilitas dan transparansi tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi ini terlihat pada Kepres No.7 Tahun 1999 di mana pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai eselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan pentingnya keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, diterbitkan juga Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah.²

Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi. Prinsip akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber –sumber, serta penggunaan wewenang harus atau diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan

¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset,2002) h. 7

²Redi Antonius Nababan. “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi” dalam *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 109

maupun melalui lembaga independen. sedangkan prinsip transparansi berarti semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.³ Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.⁴ Ciri utama dalam pengelolaan anggaran yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah dan merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, Pemerintah Kota Medan harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Namun dalam memenuhi laporan pertanggungjawabannya yaitu laporan keuangan, Pemerintah Kota Medan tidak mempublikasikan laporan keuangan daerahnya terkhusus untuk tahun 2014-2018 secara luas via internet atau media massa sehingga masyarakat tidak dapat

³ *Ibid.*

⁴Hamid Muhammad (2007) dalam Marhaendra Kusuma “Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri)dalam *JurnalCahaya Aktiva*, Vol. 02, No. 02, September 2012, h. 46.

mengetahui dan mengaksesnya dengan mudah mengenai informasi (kinerja) keuangannya. Disamping hal itu, hal ini menunjukkan rendahnya transparansi (keterbukaan) Pemerintah Kota Medan.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kota Medan selama empat tahun, dari tahun 2015-2018, BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal ini dikarenakan terkait laporan atau pendataan aset. Fakta tersebut menunjukkan lemahnya akuntabilitas keuangan daerah yang dapat menghambat kinerja instansi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa belum adanya upaya perbaikan dan pembenahan atas rekomendasi yang diberikan pemeriksa sebagai tindak lanjut dari hasil review/audit.

Cara yang ditempuh untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, diperlukannya suatu sistem akuntansi yang baik, dan sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, dan ekuitas dana.⁵

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunanyang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

⁵Ide Bagus Pujiwara *et al* "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)" dalam *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2, Nomor. 1, 2014, h. 1.

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit, dan kompleks. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas maka pengelolaan dan akses terhadap informasi keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.⁶

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan Bapak Muhammad Sayuti selaku Kasubag Pembukuan, Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mulai diterapkan di Pemerintah Kota Medan sejak tahun 2009. Salah satu sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah SIMDA Keuangan, yang dalam penerapannya masih menemui beberapa kendala teknis yaitu belum terkoneksi aplikasi SIMDA Keuangan dengan SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah).⁷

Hal kedua yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai rencana, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu perlu adanya suatu

⁶*Ibid.*, h. 2

⁷Muhammad Sayuti, Kepala Bagian Akuntansi, wawancara di Medan, tanggal 24 Juni 2019

pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan suatu upaya tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah.⁸

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.⁹

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan peraturan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 Pasal 24 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

⁸Irfan Ikhwanul Haza. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang)"dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol.3, No. 1, 2015, h. 3.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, h. 2

Daerah, menyatakan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Lemahnya akuntabilitas di Pemerintah Kota Medan yang tercermin dari opini yang diberikan auditor mengindikasikan lemahnya peran dari APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah masih menemukan beberapa kendala yaitu salah satu sistem informasi akuntansi keuangan daerah yaitu SIMDA Keuangan belum bisa terkoneksi dengan aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah).
2. Tidak adanya transparansi (keterbukaan) pemerintah daerah dengan tidak mempublikasikan laporan keuangan daerah terkhusus untuk tahun 2014-2018
3. Masih lemahnya kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Medan yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai ruang lingkup pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara khusus pada pemerintah daerah Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?

3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
5. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
6. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah
2. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah
3. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
5. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
6. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pengawasan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan mengenai sistem informasi akuntansi keuangan daerah, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Sehingga pihak OPD dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah untuk meminimalisir kesalahan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk pengawasan maupun masukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.¹¹ Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹³

¹¹Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 14

¹²Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005* (Bandung : Fokus Media, 2009), h. 23

¹³ Febriana F. Albugis “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara” dalam *Jurnal EMBA*, Vol.4, No.3, 2016, h. 80

b. Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan.¹⁴

Transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.¹⁵

Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan

¹⁴Mardiasmo “Akuntansi Sektor Publik, h. 30

¹⁵Fahril, et.al.,”Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Makassar” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. IV, No.2, Oktober 2014, h. 114

kepentingan masyarakat. Manajemen kinerja yang baik adalah merupakan titi awal dari transparansi, untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak dan privasi individu.¹⁶

c. Indikator Transparansi

Transparansi memiliki beberapa indikator. Indikator transparansi adalah sebagai berikut:¹⁷

1) Informatif (*Informative*)

Pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat

a) Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut

b) Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material

¹⁶Husaini dan Lismawati “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” dalam *Jurnal Fairness*, Volume 3, Nomor 1, 2013, h. 27

¹⁷Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 19.

c) Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman

d) Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut

e) Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis

f) Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2) Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3) Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau public (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja *financial*

a) Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu

b) Susunan Program

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

c) Bentuk perencanaan dan Hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

d. Transparansi dalam Perspektif Islam

Konsep transparansi dalam ajaran islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi’i Antonio bahwa *prophetic value of business and management* yang melekat dalam diri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam diantaranya:

- 1) *Shiddiq*, benar, nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnisnya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional.
- 2) *Amanah*, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, tanggungjawab, transparan dan tepat waktu.
- 3) *Fathanah*, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnisnya ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas
- 4) *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai bisnisnya adalah supel, penjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervise.

Nilai transparan sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan tidak terkecuali organisasi pemerintah. Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-Quran Surat Al-Isra’ ayat 35 dinyatakan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*¹⁸(Q.S Al-Isra' (17) :35)

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Jelas bahwa kejujuran seorang akuntan dalam bisnis sangat penting. Adiwarman menuliskan, jika ia sejak awal bekerja dilandasi prinsip kejujuran, bisa diharapkan hasil akhirnya akan mencapai kondisi yang didambakan. Kejujuran kerja akuntan jelas akan menciptakan efisiensi, terutama dalam pendanaan. Sebaliknya jika ia melakukan kecurangan karena dipesan oleh pihak tertentu untuk menaikkan angka yang tidak sesuai dengan plafonnya, yang terjadi bukan hanya pembengkakan jumlah nilai proyek pembiayaan, tetapi juga kemungkinan penyalahgunaan (korupsi). Tindakan ilegal ini bagian integral yang pasti dilakukan sebagai tindak lanjut pemesanan terhadap sang akuntan.²⁰

¹⁸Al-Quran dan Terjemah , Departemen Agama RI , Q.S Al-Isra' (17) : 35

¹⁹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (Surabaya, Bina Ilmu, 2004), h. 42.

²⁰Adiwarman A. Karim dalam Azhari Akmal Tarigan “ *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Tela'ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*” (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 227

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Akuntabilitas adalah “tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa dimintai pertanggungjawabannya”.²¹

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.²²

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”²³

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²⁴

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

²²Idhar Yahya. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah” dalam *Jurnal Sistem Teknik Industri*, Volume 7, No. 4, Oktober 2006, h. 27.

²³Rahardjo Adisasmita “*Manajemen Pemerintah Daerah* “ (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 89.

²⁴(Mardiasmo, 2004) dalam Edisah Putra Nainggolan dan Ikhsan Abdullah “Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan *interchangeable*, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang *participative* sebagai suatu konsekuensi logis. Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.²⁵

Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan” dalam *Jurnal Human Falah*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 99

²⁵Husaini dan Lismawati, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, h. 26

c. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa indikator. Terdapat empat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:²⁶

1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan. Misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

²⁶Mardiasmo “Akuntansi Sektor Publik, h. 21-22

d. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat.²⁷ Sebagaimana dalam firman Allaah Q.S Al-Mudassir (74):38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨

Artinya:

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S : Al-Muddasir (74): 38)*²⁸

Dan diperkuat dalam firman Allaah Q.S An-Nisa' (4) : 58;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat(Q.S An-Nisa' (4) : 58)*²⁹

Menurut Mahmud sebagaimana dikutip oleh Masiyah Kholmi ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu: Pertama, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang

²⁷MeidyaPutri,“AkuntabilitasdanTransparansidalamIslam”,https://www.academia.edu/29603801/akuntabilitas_transparansi_dalam_Islam_BAB_II.pdf. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2019

²⁸Al-Quran dan Terjemah , Departemen Agama RI , Q.S Al- Muddasir (74) : 38

²⁹Al-Quran dan Terjemah , Departemen Agama RI , Q.S An-Nisa' (4) : 58

mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. Kedua, memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu menurut pandangan Masiyah Kholmi konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Allah. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat oleh manusia maupun alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allaah.³⁰

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.³¹

³⁰Masiyah Kholmi, Akuntabilitas Dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, dalam *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, Volume 15 Nomor 1, 2012, h. 65.

³¹Muammar Khaddafi et al, *Akuntansi Syariah : Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalama Akuntansi*, (Medan: Madenatera, 2016) h. 15.

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

a. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai organisasi publik diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi supaya dapat berjalan efektif, efisien, bersih, dan transparansi sehingga dapat digunakan untuk pengendalian keputusan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem Informasi akuntansi pada pemerintah daerah dikenal dengan nama Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 menyatakan bahwa SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan juga data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah.³²Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah

³²Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010

penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.³³

Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan serangkaian mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem informasi keuangan daerah dapat membuka peluang dalam mengakses informasi keuangan dan mengelola informasi tersebut secara cepat dan akurat hal tersebut dapat diwujudkan apabila dapat memanfaatkan teknologi informasi yang baik.

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.³⁴

Seiring diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah dengan tujuan, antara lain:

³³Meta Dewi Rianisanti, "Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel moderating (Studi pada SKPD Kabupaten Klaten)"(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017) h. 40

³⁴Lilis Setyowati dan Wikan Isthika. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Semarang" dalam *Jurnal Proceedings SNEB*, 2014, h. 2

1. Membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah
2. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan
3. Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahan untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan dan akses terhadap keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan publik yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan penyederhanaan akses antara unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

b. Indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator dari sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:³⁵

1. Tingkat kecepatan
2. Tingkat keamanan
3. Tingkat efisiensi biaya
4. Tingkat kualitas hasil

4. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.³⁷

³⁵Modul SIA ; *Dunia Akuntansi dan Manajemen*, 2008

³⁶ Fadhillah Husna, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013), h. 7.

³⁷Muhammad Rifandi "Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" dalam *Jurnal Relasi*, Vol. XIV, No. 02, 2018 h. 52

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai kandungan nilai informasi yang berkualitas.³⁸

b. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bila dikaitkan dengan daur anggaran pemerintah, maka pengawasan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan kata lain, pengawasan keuangan sudah dimulai sejak tahap perencanaan dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban.

“Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.”³⁹

Pengawasan keuangan daerah penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Objek pengawasan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pengertian pengawasan keuangan daerah dilihat dari segi komponen APBD dapat pula dinyatakan sebagai berikut: pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan daerah, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran daerah, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam APBD.

³⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001

³⁹Revrison Baswir “*Akuntansi Pemerintah Indonesia*” (Yogyakarta: BPFE,1999),h. 129.

Dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Bawasda mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan yang baik berupa kebijakan pengawasan tersebut dalam jangka panjang lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan, perbaikan sistem dan manajemen pembangunan, sedangkan dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada pemberantasan KKN dan seluruh penyebab timbulnya inefisiensi.

c. Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan objek, sifat, ruang lingkup, dan metode pengawasannya.⁴⁰

- 1) Pengawasan berdasarkan objek
 - a) Pengawasan terhadap penerimaan Negara
 - b) Pengawasan terhadap pengeluaran Negara
- 2) Pengawasan berdasarkan sifatnya
 - a) Pengawasan preventif
 - b) Pengawasan detektif
- 3) Pengawasan menurut ruang lingkupnya
 - a) Pengawasan internal
 - b) Pengawasan eksternal
- 4) Pengawasan menurut metode pengawasannya
 - a) Pengawasan melekat
 - b) Pengawasan fungsional

⁴⁰Fadhilla Husna, Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang), h. 8.

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

- a) Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b) Pengawasan Ekstern, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- c) Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.
- d) Pengawasan Represif, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

d. Indikator Pengawasan

Indikator dari pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut: ⁴¹

1) Akurat (*Accurate*)

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.

2) Tepat Waktu (*Timely*)

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan

3) Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik.

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dan standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5) Realistik secara ekonomis.

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperbolehkan dari sistem tersebut.

6) Realistik secara organisasional

⁴¹T.H Handoko “ Manajemen Edisi 2 “ (Yogyakarta : BPFE, 2015), h. 371-372

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.

8) Fleksibel (*Flexible*)

Sistem pengendalian yang efektif harus dapat mengikuti perkembangan yang sedemikian rupa sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

9) Preskriptif dan operasional

Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

10) Diterima para anggota organisasi.

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggungjawab dan berprestasi.

e. Pengawasan Dalam Islam

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal berikut: Pertama, Pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhana Wata'ala. Seseorang yang yakin bahwa

Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Dalam Alquran disebutkan Q.S Al-Mujadalah ayat 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٧

Artinya:

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Mujadalah : 7)’⁴²

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam.

Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

⁴²Al-Quran dan Terjemah , Departemen Agama RI , Q.S Al- Mujadalah (58) : 7

5. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Antara Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang terkomputerisasi akan sangat mendukung dalam proses transparansi pelaporan keuangan.

Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini pemerintah dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif jika pegawai/staf dalam lembaga-lembaga pemerintah dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Oleh karena itu adalah sangat penting bagi pegawai/staf untuk mengerti kegunaan sistem tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman tersebut, maka pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah akan menjadi salah satu cara dalam memberikan kemudahan dalam hal pengolahan data yang akurat, efisien, dan terjamin keamanannya, serta sebagai alat komunikasi antar manajemen secara cepat dan terkoordinasi sehingga dapat mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang berkualitas.

b. Hubungan Antara Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit, dan semakin kompleks.

c. Hubungan Antara Pengawasan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyimpangan laporan keuangan yang masih ditemukan dalam pelaporan keuangan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan tersebut belum transparan. Bila dikaitkan dengan pengawasan keuangan daerah, maka penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menyebabkan banyak terjadi manipulasi laporan keuangan.

d. Hubungan Antara Pengawasan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif.

B. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Penelitian		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
Ide Bagus Pujiswara <i>et al</i> (2014)	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan	1. Menggunakan metode kuantitatif 2. Sama sama membahas tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	1. Terdapat perbedaan pada studi kasus 2. Peneliti menggunakan variabel independen Nilai Informasi Pelaporan Keuangan sementara penulis tidak menggunakan annya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Klungkung.

	Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)			
Ni Putu Sri Mahayuni <i>et al</i> (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	1. Menggunakan Metode Kuantitatif 2. Sama-sama membahas tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah	1. Terdapat perbedaan pada studi kasus	1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah 2. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah 3. Pemanfaatan sistem

				<p>informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah</p> <p>4. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah</p>
Meta Dewi Rianisanti (2017)	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap	<p>1. Menggunakan metode kuantitatif</p> <p>2. Sama-sama membahas penerapan sistem informasi akuntansi keuangan</p>	<p>1. Terdapat perbedaan pada studi kasus</p> <p>2. Peneliti menggunakan variabel independen Kapasitas Sumber</p>	<p>1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan</p>

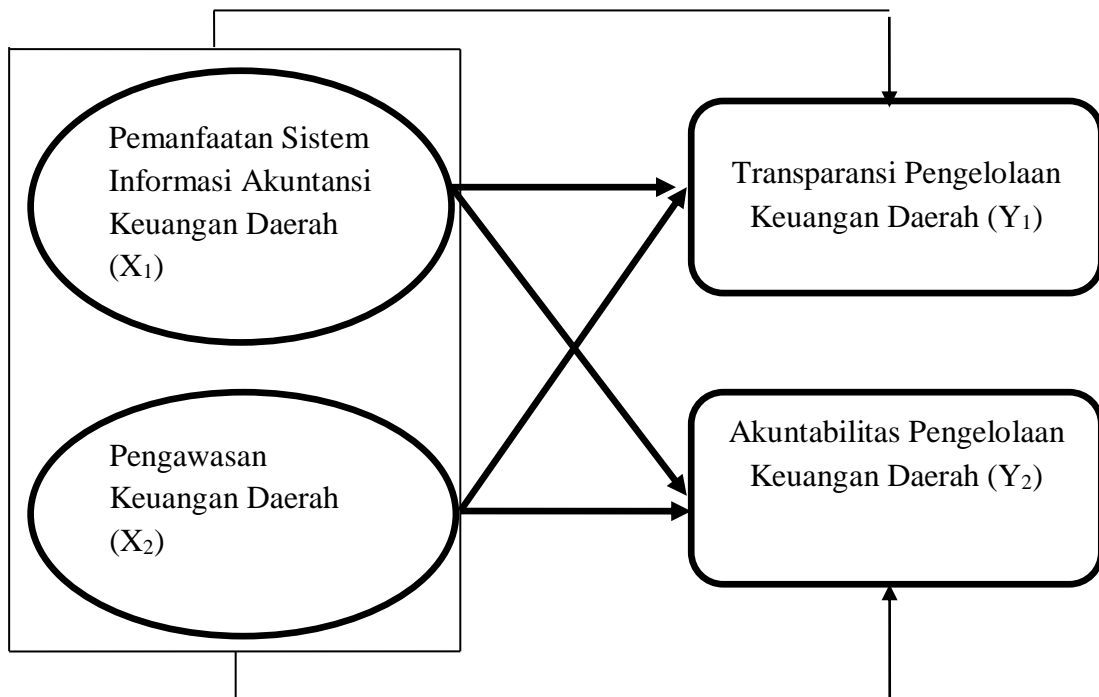
	<p>Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderating (Studi pada SKPD Kabupaten Klaten)</p>	daerah	<p>Daya Manusia sementara penulis tidak menggunakannya.</p>	<p>keuangan pemerintah daerah</p> <p>2. Kapasitas Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah</p> <p>3. Sistem Pengendalian Intern tidak dapat memoderasi hubungan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>4. Sistem</p>
--	---	--------	---	--

				<p>pengendalian intern dapat memoderasi hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah</p>
<p>Reni Kombong (2017)</p>	<p>Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja</p>	<p>1. Menggunakan metode Kuantitatif 2. Sama-sama membahas tentang Pengawasan</p>	<p>1. Terdapat perbedaan pada studi kasus</p>	<p>1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan 2. Pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.</p>

Ida Saripujiana dan Ida Suriana (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah sebagai Variabel Pemoderasi	1. Menggunakan metode Kuantitatif 2. Sama sama membahas tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen Penyajian Laporan Keuangan Daerah sedangkan penulis tidak menggunakan annya. 2. Terdapat perbedaan pada studi kasus	Aksesibilitas laporan keuangan daerah bukan merupakan variabel pemoderasi yang dapat memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Balikpapan

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) dan pengawasan keuangan daerah (X_2). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y_1) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2). Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.⁴³Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H₁=Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

H₂ = Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴³Sugiyono “*Metodologi Penelitian untuk Bisnis* “(Bandung: Alfabeta, 2004) h. 51

- H₃**= Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- H₄**= Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- H₅**= Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- H₆**= Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, Penelitian kuantitatif ialah suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik.⁴⁴

Penelitian kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Analisa data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap staf bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan mulai bulan Agustus sampai Oktober 2019.

⁴⁴Wahidmurni “Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif” <http://repository.uin-malang.ac.id/1985/2/1985> h. 1

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019					
		Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov
1.	Pengajuan judul skripsi						
2.	Bimbingan proposal skripsi						
3.	Seminar proposal						
4.	Bimbingan skripsi						
5.	Sidang munaqasah						

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan elemen-elemen yang berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit satuan kerja setingkat dinas/badan/kanntor beserta seluruh kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Medan. Jumlah OPD Kota Medan sebanyak 53 OPD yang terdiri dari 25 dinas daerah, 8 Inspektorat/Badan/Kantor, 21 Kecamatan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara berhati-hati dari populasi tersebut. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tentunya merasa tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan dengan jumlah sampel yang dianggap sudah mewakili/representative dari populasi yang ada. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling*.

Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria dalam pemilihan sampel ialah OPD yang berbentuk Dinas dan Inspektorat/Badan karena dianggap dapat mewakili OPD lainnyayang berjumlah 32 OPD yang terdiri dari 25 Dinas dan 7 Inspektorat/Badan yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan yaitu Kepala Sub Bagian dan Pegawai/staf bidang keuangan/akuntansi yang terdiri dari 2 orang dari setiap OPD. Jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 64Responden.

Tabel 3.2
Sampel Penelitian
OPD Pemerintah Kota Medan

No.	Badan/Dinas/Inspektorat
1.	Dinas Pendidikan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7.	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
8.	Dinas Ketenagakerjaan
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
10.	Dinas Ketahanan Pangan
11.	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
14.	Dinas Perhubungan
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
18.	Dinas Pertanian dan Perikanan

19.	Dinas Perindustrian
20.	Dinas Perdagangan
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga
22.	Dinas Pariwisata
23.	Dinas Kebudayaan
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
26.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Badan Penelitian dan Pengembangan
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
30.	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
31.	Dinas Pendapatan
32.	Inspektorat

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *metode purposive sampling*, yaitu yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria dapat berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu:

- 1) Para pegawai yang melaksanakan fungsi dan tugas akuntansi/ tata usaha keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.
- 2) Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan bendahara sub bagian keuangan
- 3) Responden ditetapkan pada kepala dan bendahara pengeluaran sub bagian keuangan/ akuntansi

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan bendahara pengeluaran sub bagian akuntansi/keuangan merupakan

pihak yang terlibat secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.⁴⁵ Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan bersifat kuantitatif, terdiri atas data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan memberikan kuesioner kepada responden untuk memperoleh informasi tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kota Medan.

Pengukuran dalam variabel dengan menggunakan skala Likert, yaitu segala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert yaitu mengukur sikap setuju atau tidak setujunya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju), 2 (TS = Tidak Setuju), 3 (N = Netral), 4 (S =Setuju), 5 (SS = Sangat Setuju)

⁴⁵Arfan Ikhsan et al “*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*” (Bandung : Citapustaka Media,2014) h. 122

F. Defenisi Operasional

Variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, apa yang akan diteliti oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

1. Variabel Independen (X)

a. Variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X₁)

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah. Indikator dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kecepatan
2. Tingkat keamanan
3. Tingkat efisiensi biaya
4. Tingkat kualitas hasil

b. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X₂)

Pengawasan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai kandungan nilai informasi yang berkualitas. Dengan adanya pengawasan

pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Bawasda mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Indikator dari pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Akurat
2. Tepat Waktu
3. Prespektif dan Operasional
4. Fleksibel

2. Variabel Dependen (Y)

a. Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_1)

Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena merupakan salah satu prinsip *good governance*.

Indikator dari Transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Informatif
2. Keterbukaan
3. Pengungkapan

b. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_2)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah.

Indikator dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

Tabel 3.3
Defenisi Operasional Variabel Independen

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁) adalah penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan masing-masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	1. Tingkat kecepatan	1. Mampu menghasilkan laporan keuangan dengan sistem informasi yang terintegrasi lebih cepat 2. Pengiriman Informasi dengan cepat	Likert
	2. Tingkat keamanan	1. Batasan akses hanya pegawai/staf bagian akuntansi dan keuangan	Likert
	3. Tingkat efisiensi biaya	1. Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan secara komputerisasi	Likert
	4. Tingkat kualitas hasil	1. Teknologi informasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.	Likert
Pengawasan Keuangan Daerah	1. Akurat	1. Mampu mendorong karyawan agar	Likert

(X ₂) adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai kandungan nilai informasi yang berkualitas.		menghasilkan informasi yang benar dan real	
	2. Tepat Waktu	1. Mampu mendorong agar karyawan menghasilkan informasi tepat waktu 2. Informasi yang dihasilkan dapat dikelompokkan dan dievaluasi	Likert
	3. Preskriptif dan Operasional	1. Dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan	Likert
	4. Fleksibel	1. Sistem pengendalian dapat mengikuti perkembangan organisasi.	Likert

Tabel 3.4

Defenisi Operasional Variabel Dependen

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Transparansi Pengelolaan Keuangan (Y ₁) adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan	1. Informatif	1. Jelas, akurat dan Tepat Waktu 2. Mudah diakses 3. Memadai 4. Dapat diperbandingkan	Likert
	2. Keterbukaan	1. Setiap informasi publik	Likert

informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi		harus bersifat terbuka 2. Setiap informasi publik harus mudah diakses	
	3. Pengungkapan	1. Kondisi keuangan 2. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan 3. Susunan Pengurus	Likert
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y ₂) adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban	1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum	1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi 2. Menaati ketentuan hukum yang berlaku	Likert
	2. Akuntabilitas Proses	1. Pertanggungjawaban atas segala proses organisasi	Likert
	3. Akuntabilitas Program	1. Pencapaian misi dan tujuan organisasi 2. Strategi	Likert
	4. Akuntabilitas Kebijakan	1. Pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil	Likert

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴⁶ Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan keabsahan instrument, dimana suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya. Dengan kata lain, instrumen dapat mengukur konstruk sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Validitas menyangkut sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas berarti dapat diterima dan tidak diragukan (sah). Valid berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan sehingga dapat diterima dalam kinerja tertentu.

Berdasarkan keterangan diatas, maka pendekatan yang digunakan untuk mengukur validitas dalam penelitian ini adalah validitas konstruksi (*construct validity*) dengan teknik korelasi *product moment*. Pendekatan yang digunakan dalam uji validitas pada penelitian ini adalah dengan membandingkan nilai r (*corrected item-total correlation*) dengan r table sehingga dapat diketahui item pertanyaan mana yang valid dan tidak valid. Item butir pertanyaan dinyatakan valid jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, dan sebaliknya.

⁴⁶Sugiyono (2013) dalam Jurnal Baiq Nurriszkiana et al “Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18, No. 1, 2017 h. 34

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan lebih dari dua kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama. Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Penulis menggunakan koefisien cronbach alpha untuk mengukur reliabilitas masing-masing instrument. “Instumen tersebut dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 .”⁴⁷

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel penelitian terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai signifikan 0,05 dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai p-value $> 0,05$ dan dikatakan tidak terdistribusi normal jika nilai p-value $< 0,05$. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan analisis normal probability plot. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

⁴⁷Ghozali, 2012 dalam JurnalIde Bagus Pujiswara *et al*“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)dalam *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 Nomor. 1, 2014, h. 5.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Identifikasi secara statistik untuk menunjukkan ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)⁴⁸. Indikasi adanya multikolinearitas yaitu apabila nilai VIF lebih dari 10 atau nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. “Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.”⁴⁹ Dalam penelitian ini, cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan uji Glejser dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika nilai signifikansi variabel bebas > 0.05 , maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas

⁴⁸Natak Riswanto “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”*Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2016, h. 4

⁴⁹ Patricia Runtuwene *et al.* “Pengaruh Penempatan kerja, mutasi dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Sulutgo Manado” dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No.01, 2016, h. 275.

d. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan.⁵⁰ Model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \mu$$

$$Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \mu$$

Dimana:

$$b = \frac{n \cdot \sum X_i \cdot \sum Y_i - \sum X_i \cdot Y_i}{n \cdot \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$a = \bar{Y} - b \cdot \bar{X} = \frac{\sum Y_i - b \cdot \sum X_i}{n}$$

Keterangan:

Y_1 = transparansi pengelolaan keuangan daerah

Y_2 = akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

a = konstanta

b = Koefisien arah regresi

X_1 = Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah

X_2 = pengawasan keuangan daerah

n = jumlah sampel

μ = tingkat kesalahan pengganggu

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol R^2 menunjukkan hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen dari hasil perhitungan tertentu. Sedangkan r^2 digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara tiap variabel X terhadap Y secara parsial.

⁵⁰Ori Darpito *et al* "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue" dalam *Jurnal Magister Akuntansi*, Volume 4, No. 4, 2015, h. 61

b. Uji t (uji parsial)

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji parsial (uji t). uji parsial (uji t) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).
2. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji F (Uji Simultan)

Uji simultan (Uji F-statistik) digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hasil Fhitung ini dalam output SPSS dapat dilihat dalam lampiran ANNOVA. Dasar pengambilan keputusan adalah :

1. Jika $F\text{hitung} > F\text{tabel}$, maka hipotesis diterima artinya secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis ditolak artinya secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, Danau Toba. Medan didirikan oleh Guru Patimpuss Sembiring Pelawi pada tahun 1590. Jhon Anderson, orang Eropa pertama yang mengunjungi Deli pada tahun 1833 merupakan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Tuanku Pulau Brayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya residen Pesisir Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting diluar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra, dan seorang Tionghoa.

Kota Medan dipimpin oleh seorang walikota. Saat ini, jabatan wali kota Medan dijabat oleh Dzulmi Eldin dengan jabatan wakil walikota dijabat oleh Akhyar Nasution. Wilayah Kota Medan dibagi menjadi 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relative kecil dengan jumlah penduduk yang relative besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3°30' - 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44'. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Deli Serdang
Barat	Kabupaten Deli Serdang
Timur	Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah pinggir jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada para responden. Kuesioner yang telah selesai diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dalam *Microsoft Excel* dan diolah dengan menggunakan program SPSS 20. Adapun waktu yang dikumpulkan kuesioner-kuesioner tersebut lebih kurang selama 1,5 bulan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan menyebarkan 64 kuesioner kepada responden pada bagian keuangan dan bendahara pada Operasi Perangkat Daerah Kota Medan, yang terdiri dari 1 Inspektorat, 24 Dinas dan 7 Badan. Sesuai dengan batas waktu yang telah

ditentukan. Dari 64 kuesioner yang dibagikan sebanyak 60 kuesioner yang kembali.

Tabel 4.1 dibawah ini menunjukkan rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner. Tabel tersebut juga menginformasikan tingkat pengembalian (*respon rate*)

Tabel 4.1
Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	64
Kuesioner yang kembali	60
Kuesioner yang tidak kembali	4
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian	60
Tingkat pengembalian (<i>respon rate</i>)($60/64 \times 100\%$)	94%

Sumber : Data primer diolah, 2019

Gambaran tentang profil responden dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.2 dibawah ini. Profil responden tersebut meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan waktu lama bekerja.

Tabel 4.2
Deksripsi Data Responden

Berdasarkan Jenis Kelamin		
Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	26	43%
Perempuan	34	57%
Total	60	100%
Berdasarkan Usia		
Usia	Jumlah	Persentase
20 – 30 tahun	12	20%
30 – 40 tahun	21	35%

40– 50 tahun	18	30%
>50 Tahun	9	15%
Total	60	100%
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMU	5	8%
Diploma	10	17%
S1	39	65%
S2	6	10%
Total	60	100%
Berdasarkan Lama Bekerja		
Pengalaman Kerja	Jumlah	Persentase
< 5 tahun	8	13%
5 – 10 tahun	22	37%
11 – 15 tahun	12	20%
16 – 20 tahun	8	13%
>20 tahun	10	17%
Total	60	100%

Sumber: Data primer diolah, 2019

C. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	60	18	25	22.58	2.134
Pengawasan keuangan daerah (X2)	60	17	25	21.40	1.897
Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)	60	16	25	20.57	2.310
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)	60	16	25	20.65	2.434
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel diketahui 4.3 statistik deskriptif menunjukkan bahwa:

1. Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai minimum 18, nilai maximum 25, nilai rata-rata 22.58 dan memiliki standar deviasi 2.134
2. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki nilai minimum 17, nilai maximum 25, nilai rata-rata 21.40 dan memiliki nilai standar deviasi 1.897
3. Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai minimum 16, nilai maximum 25, nilai rata-rata 20.57 dan memiliki nilai standar deviasi 2.310
4. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai minimum 16, nilai maximum 25, nilai rata-rata 20.65 dan memiliki nilai standar deviasi 2.434

D. Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukan pengujian data baik untuk deskripsi data penelitian maupun untuk pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis maka perlu dilakukan uji validitas dan realibilitas data karena jenis data penelitian adalah data primer.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas digunakan uji korelasi *pearson product moment* dengan ketentuan jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan dinyatakan valid. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil validitas dari setiap variabel dengan 60 sampel responden.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r_{tabel} (n= 60)	Keterangan
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y1)	P1	.700	.254	Valid
	P2	.749	.254	Valid
	P3	.651	.254	Valid
	P4	.620	.254	Valid
	P5	.743	.254	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y2)	P1	.778	.254	Valid
	P2	.624	.254	Valid
	P3	.742	.254	Valid
	P4	.813	.254	Valid
	P5	.698	.254	Valid
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	P1	.725	.254	Valid
	P2	.652	.254	Valid
	P3	.828	.254	Valid
	P4	.680	.254	Valid
	P5	.698	.254	Valid
Pengawasan Keuangan Daerah (X2)	P1	.778	.254	Valid
	P2	.624	.254	Valid
	P3	.742	.254	Valid

	P4	.813	.254	Valid
	P5	.698	.254	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Untuk mengetahui validitas pada setiap pernyataan, maka nilai pada kolom kolerasi (*Collected item-total colleration*) yang merupakan nilai r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} . Untuk menentukan nilai r_{tabel} terlebih dahulu dihitung derajat nilai bebas (*degree of freedom*) dengan rumus $n-2$, dimana n menyatakan banyaknya responden untuk uji validitas. Diketahui jumlah responden yang dilibatkan sebanyak $n=60$, sehingga derajat bebas bernilai $n-2= 60-2= 58$ maka diperoleh $r_{tabel}= 0,254$. Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefisien korelasi (*Corrected Item-total colleration*) yang mendapat nilai lebih besar dari $r_{tabel}=0,254$. Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.4 diketahui seluruh pernyataan bersifat valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa instrument penelitian bebas dari kesalahan persepsi sehingga memperoleh hasil yang konsisten dan dapat digunakan pada kondisi yang berbeda-beda. Uji realibilitas bertujuan untuk mengetahui suatu instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Ukuran dapat dikatakan reliabel jika ukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Reliabilitas diukur dengan menggunakan metode *Cronbach alpa*. Instrument dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach alpa* lebih besar dari 0,60. Pengujian reliabilitas menggunakan bantuan komputer program SPSS 20 dengan hasil seperti pada tabel berikut;

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Kriteria	Keterangan
manfaat sistem informasi akuntansi keuangan daerah	0,734	Alpha Cronbach>0,60 maka reliabel	Reliabel
pengawasan keuangan daerah	0,743		Reliabel
transparansi pengelolaan keuangan daerah	0,723		Reliabel
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	0,778		Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa, koefisien (r) alpha hitung seluruh variabel lebih besar dibandingkan dengan kriteria yang dipersyaratkan atau nilai kritis (*role of tumb*) sebesar 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa butir-butir pernyataan seluruh variabel dalam keadaan reliabel.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Asumsi Klasik Regresi Pertama

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan terhadap variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan uji statistik yaitu *one sample kolmogorov smirnov test*. Berikut merupakan hasil pengujian normalitas menggunakan bantuan program SPSS:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.83295818
	Absolute	.138
Most Extreme Differences	Positive	.093
	Negative	-.138
Kolmogorov-Smirnov Z		1.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.204

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Hasil pengujian normalitas data dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,204 yang lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dikatakan data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. Multikolinearitas terjadi apabila antar variabel bebas terdapat hubungan yang signifikan. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$) dan menunjukkan kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Berikut merupakan hasil pegujian multikolinearitas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	.814	1.228
	Pengawasan keuangan daerah (X2)	.814	1.228

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

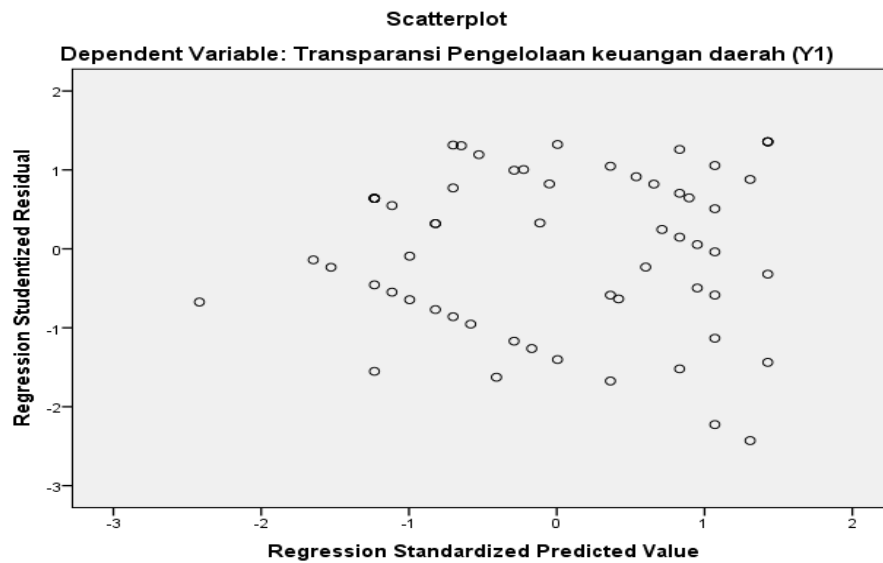
Sumber: Data Primer diolah, 2019

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatter plot* dengan melihat nilai prediksi dependen variabel (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y maka terjadi homoskedastisitas. Gambar berikut menampilkan pola titik-titik untuk mengetahui heteroskedastisitas.



Gambar 4.1
Scatter Plot Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan pola titik-titik pada grafik *scatter plot* tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah titik nol (0) pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai.

2. Uji Asumsi Klasik Regresi Kedua

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan terhadap variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan uji statistik yaitu *one sample kolmogorov smirnov test*. Berikut merupakan hasil pengujian normalitas menggunakan bantuan program SPSS

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	1.93382800
	Absolute	.114
Most Extreme Differences	Positive	.087
	Negative	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		.880
Asymp. Sig. (2-tailed)		.420

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer diolah, 2019

Hasil pengujian normalitas data dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,420 yang lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dikatakan data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. Multikolinearitas terjadi apabila antar variabel bebas terdapat hubungan yang signifikan. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	.814	1.228
Pengawasan keuangan daerah (X2)	.814	1.228

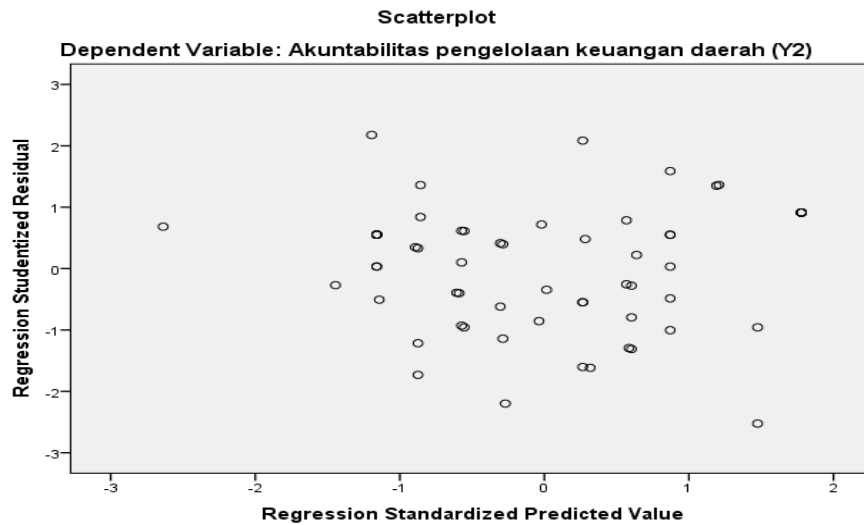
a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai $VIF < 10$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residu suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.



Gambar 4.2
Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute. Hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya (sig) di atas 0,05 ($\text{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

F. Analisis Regresi

1. Analisis Regresi Linear Berganda Pertama

Analisis regresi pertama dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan bantuan program SPSS 20 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Analisis Regresi Linear Berganda Pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.870	3.151		1.228	.224
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	.580	.126	.536	4.602	.000
Pengawasan keuangan daerah (X2)	.168	.142	.138	1.182	.242

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y1 = 3,870 + 0,580 X1 + 0,168 X2 + e$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar 3,870 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari kedua variabel independen dan faktor lain, maka variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y1) pada organisasi perangkat daerah Kota Medan adalah 3,870
2. Koefisien regresi variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 0,580 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,580.
3. Koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah 0,168 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pengawasan keuangan daerah akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,168.

2. Analisis Regresi Linear Berganda Kedua

Analisis regresi pertama dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan bantuan program SPSS 20 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11
Analisis Regresi Linear Berganda Kedua

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.562	3.324		.470	.640
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	.421	.133	.369	3.167	.002
Pengawasan keuangan daerah (X2)	.447	.150	.349	2.989	.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y_2 = 1,562 + 0,421 X_1 + 0,447 X_2 + e$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar 1,562 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari kedua variabel independen dan faktor lain, maka variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2) pada organisasi perangkat daerah Kota Medan adalah 1,562
2. Koefisien regresi variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 0,421 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi

kenaikan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,421.

3. Koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah 0,447 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pengawasan keuangan daerah akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,447.

G. Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis Regresi Pertama

a. Koefisien Determinasi

Uji determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R^2 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 ^a	.370	.348	1.865

a. Predictors: (Constant), Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,370, yang mengandung arti bahwa 37% variasi besarnya transparansi pengelolaan keuangan daerah bisa dijelaskan oleh variasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan sisanya 63% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

b. Uji t (Regresi Parsial)

Selanjutnya untuk meyakinkan bahwa masing-masing variabel yaitu : pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan pengujian secara parsial. Perhitungan komputer yang disajikan dari tabel diperoleh nilai t_{hitung} sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Analisis Parsial

Variabel	$t_{hitung} > t_{tabel}$		Prob. Sig		Ket
	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	$\alpha = 5\%$	
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	4,602	2,002	0,000	0,05	Sig
Pengawasan Keuangan Daerah	1,182	2,002	0,242	0,05	Tdk

Sumber: Ringkasan output estimasi

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) dari tabel 4.13 dapat ditampilkan sebagai berikut:

1. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $4,602 > 2,002$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dinyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan.
2. Variabel pengawasan keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana $1,182 < 2,002$ dengan tingkat signifikansi $0,242$ sehingga dinyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan.

c. Uji F

Uji F seringkali juga dinamakan *analysis of variance*. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model, secara bersama-sama mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel yang ingin dijelaskan dengan menggunakan uji F test. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1 secara bersama-sama.

Tabel 4.14

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	116.509	2	58.254	16.751	.000 ^b
	Residual	198.224	57	3.478		
	Total	314.733	59			

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

b. Predictors: (Constant), Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel tampak bahwa nilai F hitung sebesar 16,751 lebih besar dari dari F tabel sebesar 3,16 dengan angka signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Uji Hipotesis Regresi kedua

a. Koefisien Determinasi

Uji determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R^2 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15
Uji Determinansi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.607 ^a	.369	.347	1.967

a. Predictors: (Constant), Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,369, yang mengandung arti bahwa 36,9% variasi besarnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bisa dijelaskan oleh variasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan sisanya 64,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model

b. Uji t (Regresi Parsial)

Selanjutnya untuk meyakinkan bahwa masing-masing variabel yaitu : pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan pengujian secara parsial. Dari perhitungan komputer yang disajikan dari tabel diperoleh nilai t_{hitung} sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Parsial

Variabel	$t_{hitung} > t_{tabel}$		Prob. Sig		Ket
	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	$\alpha = 5\%$	
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	3,167	2,002	0,002	0,05	Sig
Pengawasan Keuangan Daerah	2,989	2,002	0,004	0,05	Sig

Sumber: Ringkasan output estimasi

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) dari tabel 4.13 dapat ditampilkan sebagai berikut:

1. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $3,167 > 2,002$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dinyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Variabel pengawasan keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $2,989 < 2,002$ dengan tingkat signifikansi $0,004$ sehingga dinyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Uji F

Uji F seringkali juga dinamakan *analysis of variance*. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model, secara bersama-sama mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel yang ingin dijelaskan dengan menggunakan uji F test. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y2 secara bersama-sama.

Tabel 4.17**Hasil Uji F****ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	129.008	2	64.504	16.664	.000 ^b
	Residual	220.642	57	3.871		
	Total	349.650	59			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

b. Predictors: (Constant), Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel tampak bahwa nilai F hitung sebesar 16,664 lebih besar dari dari F tabel sebesar 3,16 dengan angka signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H. Pembahasan

1. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari berbagai jenis uji yang sudah dilakukan, hasil yang didapat yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan variabel terikat transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang berarti H_1 diterima. Adanya pengaruh yang positif menunjukkan bahwa antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah searah. Artinya jika pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah semakin tinggi, maka tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin tinggi. Sedangkan adanya pengaruh yang signifikan dapat dilihat dari nilai

probabilitas dalam uji t pada penelitian ini, yaitu $0,000 < 0,05$. Berarti memang terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Ni Putu Sri Mahayuni (2017), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Selain penelitian tersebut, masih ada penelitian lainnya yang mendukung hasil penelitian ini, yaitu Pujiswara (2014), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Klungkung.

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, didapatkan hasil, yaitu H_2 ditolak. Artinya pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pengawasan keuangan daerah sebesar 0,242 berarti tingkat signifikansinya diatas 0,05. Nilai $t_{hitung} 1,182 < 2,665 t_{tabel}$. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_2 ditolak. Hal ini dikarenakan bahwa pengawasan keuangan daerah belum efektif dilakukan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Sri Mahayuni (2017), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan teori bahwa adanya pengawasan yang efektif dan sistematis terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka pelaporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah mampu bersifat transparan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan tersebut sudah benar atau valid. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Puspasari, dkk (2017), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan dengan indikasi bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang memiliki pengawasan atas pengelolaan keuangan yang baik maka akan meningkatkan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, semua penelitian menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi dengan indikasi bahwa setiap SKPD memiliki pengawasan keuangan daerah yang baik sehingga dapat meningkatkan transparansi. Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang didapat, menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Medan belum memiliki pengawasan keuangan daerah yang baik. Dapat kita lihat dari hasil kuesioner yang diisi oleh setiap OPD dimana belum adanya pengawasan secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengecekan kecukupan sarana komputer, kondisi ekonomis komputer yang ada, tersedianya antivirus, database, keefisienan serta keefektifan software aplikasi sistem pengelolaan keuangan yang dipakai.

3. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada variabel bebas pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap variabel terikat transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga H_3 diterima. Berdasarkan pengujian hipotesis H_3 melalui uji F terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari Ni Putu Sri Mahyuni (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi

keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah akan sangat membantu proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengawasan keuangan daerah yang baik adalah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Selain itu, pengawasan keuangan daerah yang baik adalah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut akan semakin maksimal.

4. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan uji t pada tabel menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki nilai t_{hitung} 3,167 dan nilai probabilitas sebesar 0,002. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yakni 2,665 dan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. Bagi pemerintah Kota Medan yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks, pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan keakurasian dan kecepatan dalam pemrosesan data, serta penyampaian informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga akan meningkatkan akuntabilitas proses, dimana akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

5. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan H_5 diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh positif ini berarti antara variabel bebas dan terikat memiliki hubungan yang searah. Jika pengawasan keuangan daerah semakin tinggi maka tingkat akuntabilitas pemerintah daerah juga akan semakin tinggi. Hubungan positif ini juga dapat dibuktikan dengan koefisien β yang bernilai positif 0,447. Pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, didukung oleh penelitian sebelumnya dari Ni Putu Sri Mahayuni (2017) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Karangasem. Begitu pula dengan penelitian menurut Pujiswara (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Klungkung.

6. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis H_6 melalui uji F terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Kota Medan.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Medan sangat membantu mempercepat pengelolaan transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan secara maksimal sehingga meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan untuk publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum dalam pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya dari Yuliani (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, adapun saran yang diberikan dala penelitian ini yaitu:

1. Bagi pihak OPD khususnya pegawai pada bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan untuk bisa lebih memaksimalkan penggunaan

kecanggihan teknologi untuk pemanfaatan sistem informasi akuntansi terkhusus untuk aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMBADA (Sistem Informasi Barang Daerah) untuk bisa terkoneksi satu sama lain sehingga tidak perlu penginputan manual kembali.

2. Bagi pihak OPD untuk bisa lebih mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terkhusus pengawasan secara berkala terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.
3. Bagi pihak OPD untuk bisa lebih meningkatkan pengawasan keuangan daerah dengan pengawasan berbasis online sehingga dapat lebih memudahkan fungsi pengawasan.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas sampel penelitian dengan meneliti di seluruh OPD yang ada di pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *“Manajemen Pemerintah Daerah “* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Bahreisy, Salim Bahreisy dan Bahreisy ,Said. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (Surabaya, Bina Ilmu, 2004)
- Baswir, Revrison. *“Akuntansi Pemerintah Indonesia”* (Yogyakarta: BPFE,1999)
- Darpito, Ori. “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue” dalam *Jurnal Magister Akuntansi*, Volume 4, No. 4, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- F. Albugis, Febriana. “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara” dalam *Jurnal EMBA*, Vol.4, No.3,2016
- Fahril. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Makassar*” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. IV, No.2, Oktober 2014
- Haza, Irfan Ikhwanul. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang)” dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol.3, No. 1, 2015
- Husaini dan Lismawati “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” dalam *Jurnal Fairness*, Volume 3, Nomor 1, 2013
- Husna, Fadhilla. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013)
- Ikhsan, Arfan. *“Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”* (Bandung : Citapustaka Media,2014)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001

Khaddafi, Muammar dkk. *Akuntansi Syariah : Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi*, (Medan: Madenatera, 2016)

Kholmi, Masiyah. Akuntabilitas Dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, dalam *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, Volume 15 Nomor 1, 2012

Kusuma, Marhaendra “Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri) dalam *Jurnal Cahaya Aktiva*, Vol. 02, No. 02, September 2012

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002)

_____, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2009)

Modul SIA ; *Dunia Akuntansi dan Manajemen*, 2008

Nababan, Redi Antonius. “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi” dalam *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018

Nainggolan, Edisah Putra dan Abdullah, Ikhsan “Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan” dalam *Jurnal Human Falah*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2016

Nurrizkiana, Baiq. “Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan *Public-Stakeholders*” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18, No. 1, 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010

Pujiswara, Ide Bagus “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)” dalam *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2, Nomor. 1, 2014

Putri, Meidya, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Islam", https://www.academia.edu/29603801/akuntabilitas_transparansi_dalam_Islam_BAB_II.pdf.
Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2019

Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)

Rianisanti, Meta Dewi. "Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel moderating (Studi pada SKPD Kabupaten Klaten)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017)

Rifandi, Muhammad. "Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" dalam *Jurnal Relasi*, Vol. XIV, No. 02, 2018

Riswanto, Natak. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember" *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2016

Runtuwene, Patricia. "Pengaruh Penempatan kerja, mutasi dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Sulutgo Manado" dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No.01, 2016

Setyowati, Lilis dan Isthika, Wikan. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Semarang" dalam *Jurnal Proceedings SNEB*, 2014

Tarigan, Azhari Akmal " *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Tela'ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*" (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016)

Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005* (Bandung : Fokus Media, 2009)

T.H Handoko " *Manajemen Edisi 2* " (Yogyakarta : BPFE, 2015)

Wahidmurni "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif" <http://repository.uin-malang.ac.id/1985/2/1985>. Diunduh pada tanggal 7 Agustus 2019.

Yahya , Idhar. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah" dalam *Jurnal Sistem Teknik Industri*, Volume 7, No. 4, Oktober 2006

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	60	18	25	22.58	2.134
Pengawasan keuangan daerah (X2)	60	17	25	21.40	1.897
Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)	60	16	25	20.57	2.310
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)	60	16	25	20.65	2.434
Valid N (listwise)	60				

Lampiran

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL X1

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.187	.595**	.414**	.543**	.725**
	Sig. (2-tailed)		.153	.000	.001	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X1.2	Pearson Correlation	.187	1	.368**	.251	.190	.652**
	Sig. (2-tailed)	.153		.004	.053	.147	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X1.3	Pearson Correlation	.595**	.368**	1	.510**	.515**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X1.4	Pearson Correlation	.414**	.251	.510**	1	.469**	.680**
	Sig. (2-tailed)	.001	.053	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X1.5	Pearson Correlation	.543**	.190	.515**	.469**	1	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000	.147	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
Total_X1	Pearson Correlation	.725**	.652**	.828**	.680**	.698**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary		
		N
		%
Cases	Valid	60
	Excluded ^a	0
	Total	60
		100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.734	.772	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4.60	.558	60
X1.2	4.22	.846	60
X1.3	4.40	.643	60
X1.4	4.72	.454	60
X1.5	4.65	.481	60

Inter-Item Correlation Matrix

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
X1.1	1.000	.187	.595	.414	.543
X1.2	.187	1.000	.368	.251	.190
X1.3	.595	.368	1.000	.510	.515
X1.4	.414	.251	.510	1.000	.469
X1.5	.543	.190	.515	.469	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	17.98	3.135	.559	.434	.667
X1.2	18.37	2.914	.320	.143	.801
X1.3	18.18	2.695	.684	.499	.609
X1.4	17.87	3.440	.538	.327	.685
X1.5	17.93	3.351	.551	.390	.678

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22.58	4.552	2.134	5

Lampiran

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL X2

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.521**	.147	.188	.308*	.596**
	Sig. (2-tailed)		.000	.264	.151	.017	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.2	Pearson Correlation	.521**	1	.310*	.291*	.430**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000		.016	.024	.001	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.3	Pearson Correlation	.147	.310*	1	.507**	.409**	.679**
	Sig. (2-tailed)	.264	.016		.000	.001	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.4	Pearson Correlation	.188	.291*	.507**	1	.564**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.151	.024	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.5	Pearson Correlation	.308*	.430**	.409**	.564**	1	.772**
	Sig. (2-tailed)	.017	.001	.001	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
Total_X2	Pearson Correlation	.596**	.713**	.679**	.753**	.772**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.743	.744	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	4.52	.504	60
X2.2	4.38	.524	60
X2.3	4.22	.524	60
X2.4	4.02	.624	60
X2.5	4.27	.516	60

Inter-Item Correlation Matrix

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
X2.1	1.000	.521	.147	.188	.308
X2.2	.521	1.000	.310	.291	.430
X2.3	.147	.310	1.000	.507	.409
X2.4	.188	.291	.507	1.000	.564
X2.5	.308	.430	.409	.564	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	16.88	2.715	.380	.283	.742
X2.2	17.02	2.457	.529	.371	.691
X2.3	17.18	2.525	.481	.298	.708
X2.4	17.38	2.206	.541	.410	.687
X2.5	17.13	2.355	.617	.411	.658

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21.40	3.600	1.897	5

Lampiran

UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS VARIABEL Y1

		Correlations					
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Total_Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	.420**	.138	.154	.519**	.700**
	Sig. (2-tailed)		.001	.294	.241	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Y1.2	Pearson Correlation	.420**	1	.399**	.383**	.423**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.001		.002	.003	.001	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Y1.3	Pearson Correlation	.138	.399**	1	.716**	.246	.651**
	Sig. (2-tailed)	.294	.002		.000	.058	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Y1.4	Pearson Correlation	.154	.383**	.716**	1	.184	.620**
	Sig. (2-tailed)	.241	.003	.000		.160	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Y1.5	Pearson Correlation	.519**	.423**	.246	.184	1	.743**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.058	.160		.000
	N	60	60	60	60	60	60
Total_Y1	Pearson Correlation	.700**	.749**	.651**	.620**	.743**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary		
		N
		%
Cases	Valid	60
	Excluded ^a	0
	Total	60
		100.0
		.0
		100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.723	.736	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1.1	4.02	.770	60
Y1.2	3.78	.640	60
Y1.3	4.37	.581	60
Y1.4	4.48	.504	60
Y1.5	3.92	.809	60

Inter-Item Correlation Matrix

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5
Y1.1	1.000	.420	.138	.154	.519
Y1.2	.420	1.000	.399	.383	.423
Y1.3	.138	.399	1.000	.716	.246
Y1.4	.154	.383	.716	1.000	.184
Y1.5	.519	.423	.246	.184	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	16.55	3.438	.456	.325	.691
Y1.2	16.78	3.529	.580	.338	.639
Y1.3	16.20	3.925	.465	.539	.684
Y1.4	16.08	4.145	.456	.525	.692
Y1.5	16.65	3.214	.506	.333	.672

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20.57	5.334	2.310	5

Lampiran

UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS VARIABEL Y2

		Correlations					
		Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2.4	Y2.5	Total_Y2
Y2.1	Pearson Correlation	1	.436**	.355**	.531**	.381**	.778**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.000	.003	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Y2.2	Pearson Correlation	.436**	1	.347**	.263*	.271*	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000		.007	.043	.036	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Y2.3	Pearson Correlation	.355**	.347**	1	.577**	.492**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.005	.007		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Y2.4	Pearson Correlation	.531**	.263*	.577**	1	.568**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.043	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Y2.5	Pearson Correlation	.381**	.271*	.492**	.568**	1	.698**
	Sig. (2-tailed)	.003	.036	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
Total_Y2	Pearson Correlation	.778**	.624**	.742**	.813**	.698**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary		
		N
		%
Cases	Valid	60
	Excluded ^a	0
	Total	60

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.778	.785	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y2.1	4.00	.823	60
Y2.2	4.28	.613	60
Y2.3	4.00	.638	60
Y2.4	4.00	.736	60
Y2.5	4.37	.486	60

Inter-Item Correlation Matrix

	Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2.4	Y2.5
Y2.1	1.000	.436	.355	.531	.381
Y2.2	.436	1.000	.347	.263	.271
Y2.3	.355	.347	1.000	.577	.492
Y2.4	.531	.263	.577	1.000	.568
Y2.5	.381	.271	.492	.568	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y2.1	16.65	3.486	.573	.380	.736
Y2.2	16.37	4.440	.430	.241	.774
Y2.3	16.65	4.028	.583	.404	.727
Y2.4	16.65	3.553	.659	.521	.697
Y2.5	16.28	4.512	.571	.373	.741

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20.65	5.926	2.434	5

Lampiran

UJI REGRESI PERTAMA

NPar Tests 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.83295818
	Absolute	.138
Most Extreme Differences	Positive	.093
	Negative	-.138
Kolmogorov-Smirnov Z		1.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.204

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Heterokedastisitas 1

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.870	3.151		1.228	.224
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	.580	.126	.536	4.602	.000
Pengawasan keuangan daerah (X2)	.168	.142	.138	1.182	.242

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

Regression 1

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1) ^b		Enter

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 ^a	.370	.348	1.865

a. Predictors: (Constant), Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)

b. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	116.509	2	58.254	16.751	.000 ^b
Residual	198.224	57	3.478		
Total	314.733	59			

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

b. Predictors: (Constant), Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.870	3.151		1.228	.224		
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	.580	.126	.536	4.602	.000	.814	1.228
Pengawasan keuangan daerah(X2)	.168	.142	.138	1.182	.242	.814	1.228

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

Collinearity Diagnostics^a

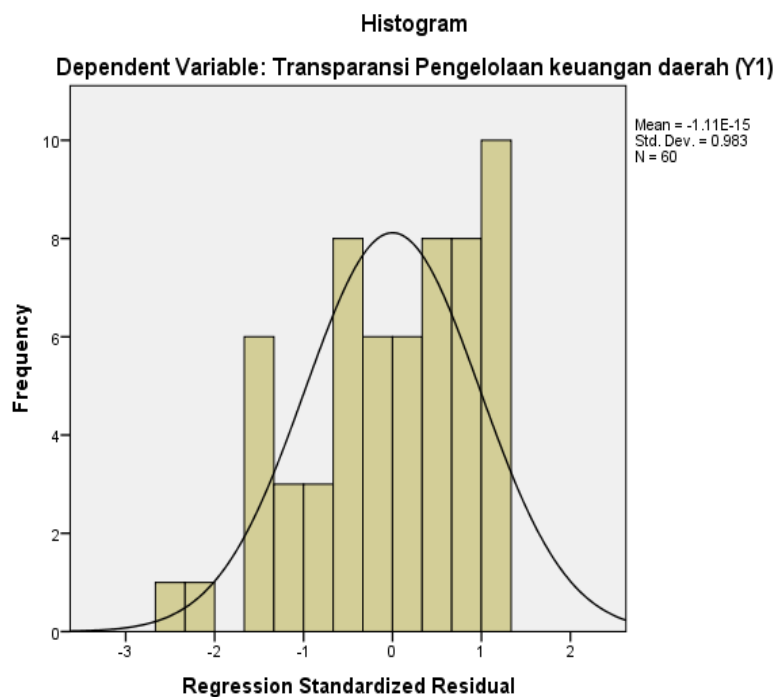
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	Pengawasan keuangan daerah (X2)
1	1	2.991	1.000	.00	.00	.00
	2	.005	25.050	.09	.96	.37
	3	.004	28.022	.91	.04	.63

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

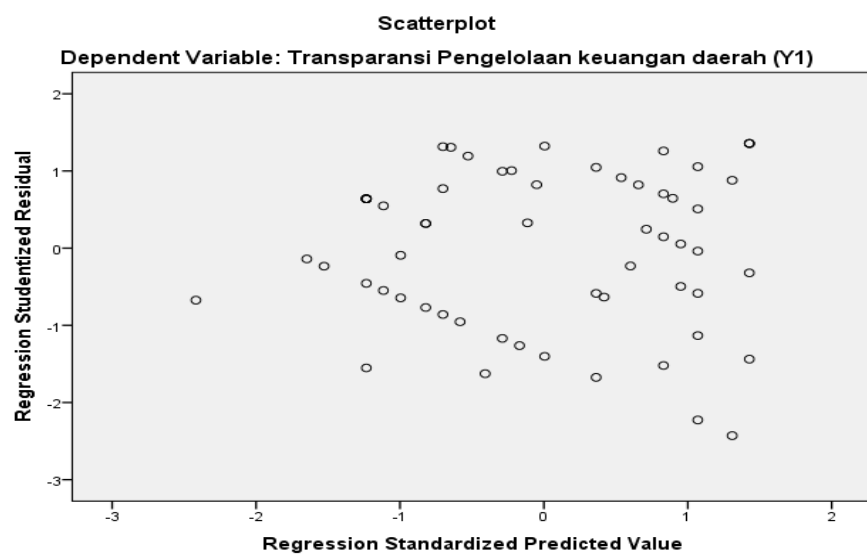
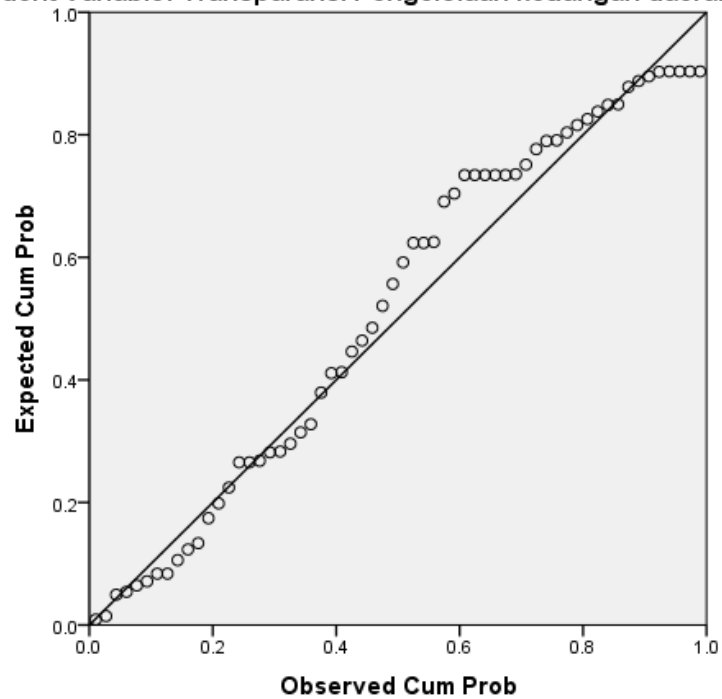
Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	17.17	22.57	20.57	1.405	60
Std. Predicted Value	-2.418	1.428	.000	1.000	60
Standard Error of Predicted Value	.251	.686	.406	.096	60
Adjusted Predicted Value	17.35	22.80	20.56	1.401	60
Residual	-4.405	2.427	.000	1.833	60
Std. Residual	-2.362	1.301	.000	.983	60
Stud. Residual	-2.430	1.357	.002	1.008	60
Deleted Residual	-4.660	2.637	.006	1.927	60
Stud. Deleted Residual	-2.543	1.367	-.003	1.019	60
Mahal. Distance	.085	6.997	1.967	1.456	60
Cook's Distance	.000	.114	.017	.022	60
Centered Leverage Value	.001	.119	.033	.025	60

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (Y1)



Lampiran

HASIL ANALISIS REGRESI KEDUA

NPar Tests 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.93382800
	Absolute	.114
Most Extreme Differences	Positive	.087
	Negative	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		.880
Asymp. Sig. (2-tailed)		.420

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Heteroskedastisitas 2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.540	1.809		-.851	.398
1 Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	.083	.072	.164	1.146	.257
Pengawasan keuangan daerah (X2)	.059	.081	.103	.721	.474

a. Dependent Variable: RES2

Regression 2

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.607 ^a	.369	.347	1.967

a. Predictors: (Constant), Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	129.008	2	64.504	16.664	.000 ^b
Residual	220.642	57	3.871		
Total	349.650	59			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

b. Predictors: (Constant), Pengawasan keuangan daerah (X2), Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.562	3.324		.470	.640		
Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	.421	.133	.369	3.167	.002	.814	1.228
Pengawasan keuangan daerah (X2)	.447	.150	.349	2.989	.004	.814	1.228

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

Collinearity Diagnostics^a

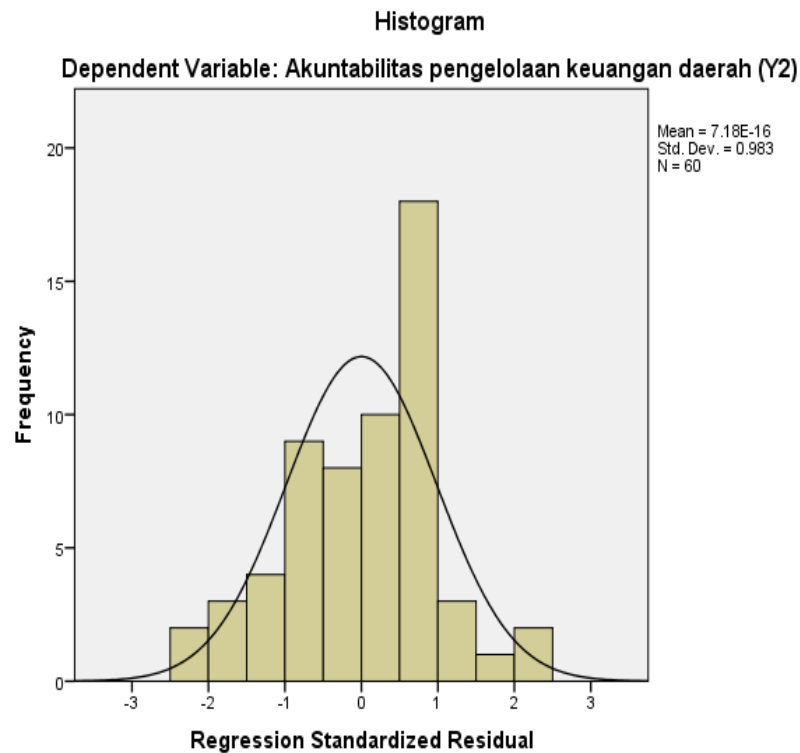
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pemanfataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1)	Pengawasan keuangan daerah (X2)
1	1	2.991	1.000	.00	.00	.00
	2	.005	25.050	.09	.96	.37
	3	.004	28.022	.91	.04	.63

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

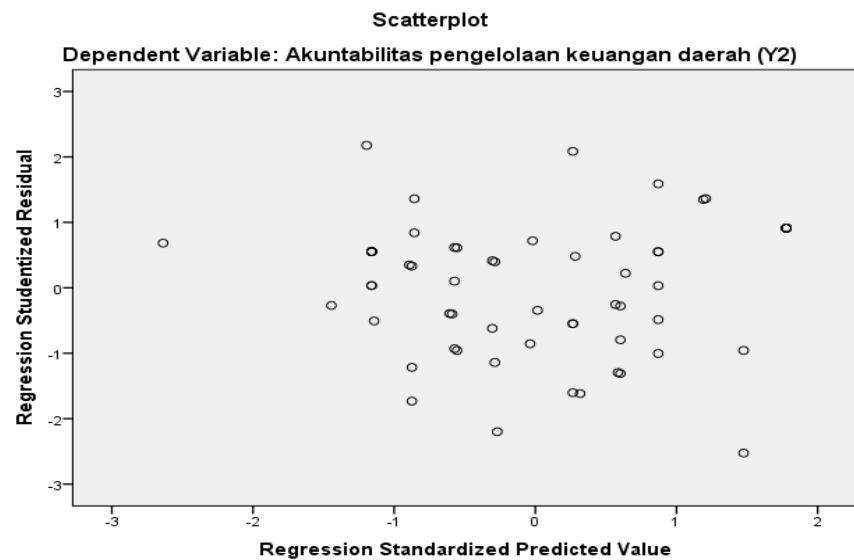
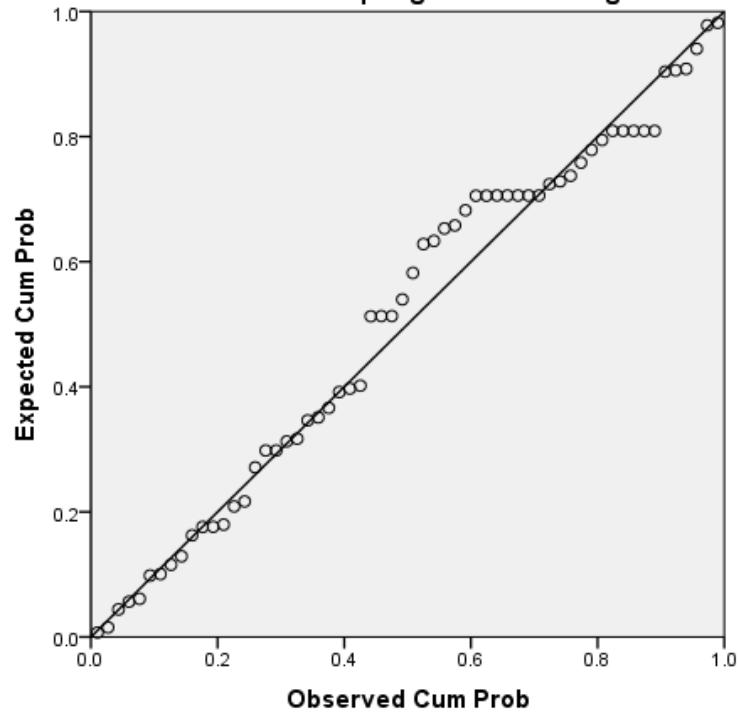
Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	16.75	23.28	20.65	1.479	60
Std. Predicted Value	-2.637	1.778	.000	1.000	60
Standard Error of Predicted Value	.265	.724	.428	.101	60
Adjusted Predicted Value	16.56	23.13	20.64	1.480	60
Residual	-4.831	4.116	.000	1.934	60
Std. Residual	-2.456	2.092	.000	.983	60
Stud. Residual	-2.525	2.177	.004	1.009	60
Deleted Residual	-5.110	4.456	.014	2.040	60
Stud. Deleted Residual	-2.656	2.253	.001	1.026	60
Mahal. Distance	.085	6.997	1.967	1.456	60
Cook's Distance	.000	.130	.018	.028	60
Centered Leverage Value	.001	.119	.033	.025	60

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y2)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Mila Aguspita
Nim : 52151005
Tpt/Tgl Lahir : Stabat, 02 Agustus 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. Ampira Dusun II, Stabat Lama Barat

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Negeri 056612 Berijazah tahun 2009
Tamatan MTS Negeri Stabat Berijazah tahun 2012
Tamatan MA Negeri 1 Stabat Berijazah tahun 2015
Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah tahun 2019

III. RIWAYAT ORGANISASI

Anggota KSEI UIE Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017)